

Tantangan Keamanan Nasional Indonesia dalam Menyikapi Transformasi Separatisme dan *Cyberprotest* di Papua¹

Rany Purnama Hadi, S.IP

Universitas Airlangga

ranyphadi@gmail.com

Abstract

By the end of the Great World Wars, the series of conflicts have changed from inter-nations war to intra-nation warfare. Conflict between states has turned into small arms conflicts such as guerilla war, genocide, terror, and also separatism. One of the longest periods of separatism movements that have happened is the separatism of West Papua in Indonesia. For more than 70 years west Papuan people have leveled protest against the government and struggling for their independence. Consequently, the Indonesian army often collides in arms conflict as a defense against separatist group. But, during the 2000s the nature of conflict has changing. The separatism movement that used to be dominated by violence struggle has been shifted into non-violent struggle through the use of media and technology. Separatist group such as OPM and PCWP have targeting international dialog and forums in order to receive more international support to address their will. These types of cyber-protest indeed caused a threat to Indonesia's national security. The expansion of technology and media that gives an opportunity for the development of such movement and without a proper strategy, not impossible it might spread bigger and challenge the unity of Indonesia. Therefore, this new form of separatism needs to have further attention from the Indonesian government as an attempt to maintain its sovereignty.

Keywords

Separatism, cyber-protest, non-violence struggle, civil resistance, national security.

¹ Dipresentasikan pertama kali dalam "*Joint Seminar on Public and International Affairs UUM-Unair*" pada 27 September 2016, di University Utara Malaysia

Pendahuluan

Papua merupakan salah satu bagian dari wilayah teritori pemerintah Indonesia yang sedang mengalami konflik separatisme hingga saat ini. Konflik yang terjadi Papua atau yang sering disebut oleh masyarakat internasional sebagai *West Papua*, merupakan konflik internal antara pemerintah Indonesia dengan masyarakat Papua yang telah terjadi bahkan sejak awal kemerdekaan. Wilayah Papua, atau yang sering disebut dengan *West Papua*, sendiri merupakan nama yang digunakan untuk menyebut kawasan yang terletak di sebelah barat Papua Nugini atau *western half of New Guinea*. Pemerintah Indonesia kemudian membagi wilayah *West Papua* ini menjadi dua region yaitu Papua dan Papua Barat. Meski telah menjadi bagian dari pemerintahan Negara Republik Indonesia yang disepakati melalui *Act of Free Choice* pada tahun 1969, akan tetapi banyak masyarakat Papua yang merasa bukan menjadi bagian dari Indonesia dan menginginkan kemerdekaan bagi Papua (Chauvel & Bhakti, 2004). Akibatnya, muncul perlawanan terhadap pemerintah Indonesia dari masyarakat Papua yang menuntut adanya kemerdekaan dari Indonesia yang berlanjut pada separatisme.

Konflik separatisme Papua memang memiliki latar belakang konflik yang cukup rumit. Dimulai sejak tahun 1945, yakni pada awal kemerdekaan, perebutan atas wilayah Papua mulai muncul ke permukaan dengan melibatkan pemerintah Indonesia yang baru saja merdeka, dengan pihak Kerajaan Belanda (Chauvel & Bhakti, 2004). Yang menjadi permasalahan pada masa itu adalah pihak pemerintah Indonesia menginginkan wilayah Papua menjadi bagian dari wilayah Indonesia. Sedangkan pemerintah Belanda merasa masih memiliki kekuasaan di teritori tersebut dan menganggap bahwa Papua, yang dulunya bernama *Nederlan Nieuw Guinea*, memiliki wilayah kesatuan politik yang berbeda dengan Indonesia, dengan koneksi sejarah dan budaya yang berbeda pula dibanding kepulauan Indonesia lainnya (MacLeod, 2009). Pihak Kerajaan Belanda bahkan telah mempersiapkan untuk menjadikan Papua untuk menjadi negara persemakmuran Belanda, dengan membangun daerah pemerintahan, dinas-dinas, dan badan-badan ketatanegaraan yang dipimpin oleh Gubernur *Nieuw Guinea* dan ditentukan langsung oleh Ratu Belanda pada tahun 1949 (Sugandi, 2008). Perbedaan pendapat terkait status Papua ini kemudian dibawa oleh perwakilan Indonesia ke ranah internasional dalam perundingan di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Setelah melewati perdebatan yang cukup kompleks, akhirnya pada tahun 1962, sebagai jalan keluar, PBB mengambil alih kekuasaan sementara atas Papua melalui

New York Agreement, yang kemudian diserahkan kepada pemerintah Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963.

Selanjutnya, pada tahun 1965 terbentuklah Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau *Free Papua Movement* yang merupakan organisasi perlawanan terhadap pemerintah Indonesia. Tujuan dari pembentukan organisasi ini adalah untuk mengakhiri kekuasaan Indonesia di Papua dan menjadikan Papua sebagai negara merdeka (Tebay, 2005). OPM kemudian banyak melakukan protes-protes serta upaya pemerdekaan dengan metode gerilya dimana kelompok separatis masih menggunakan senjata tradisional seperti tombak, busur dan panah. Mereka juga membentuk Tentara Pembebasan Nasional-Papua Barat atau TPN-PB yang terdiri dari pasukan militer yang dilengkapi dengan persenjataan yang lebih modern. Meski demikian, bentuk serangan yang dilakukan oleh OPM dan TPN-TB terjadi dalam level yang rendah, seperti misalnya serangan yang dilakukan oleh kelompok separatis ke gudang senjata pasukan TNI atau dengan meledakkan tambang Freeport dan melakukan penculikan terhadap peneliti asing yang ada di Papua. Dalam menghadapi perlawanan dari kelompok Papua tersebut, pemerintah Indonesia memanfaatkan kekuatan militer untuk membendung pemberontakan. (MacLeod, 2009). Adanya *armed resistance* yang kemudian menyebabkan timbulnya korban akibat perselisihan antara pasukan TNI dengan kelompok separatis.

Hingga kemudian pada tahun 2002, seiring dengan semakin meningkatnya perhatian internasional terhadap isu-isu kemanusiaan, dilakukan konferensi di Papua yang dipelopori oleh aktivis-aktivis kemanusiaan melalui *Peace Conference in West Papua* guna membicarakan terkait permasalahan di Papua. Sejak saat itu, proses perjuangan kemerdekaan Papua beralih menjadi yang pada awalnya didominasi oleh *violent struggle*, menjadi *nonviolent struggle* (MacLeod, 2009). Meski tak menutup kemungkinan penggunaan senjata sebagai bentuk pertahanan diri. Perjuangan ini banyak mendapatkan dukungan dari komunitas sipil maupun organisasi yang mendukung kemerdekaan Papua. Sebagai bentuk perubahan bentuk separatisme OPM menjadi *nonviolent*, proses perjuangan kemerdekaan yang dilakukan kemudian tidak lagi menggunakan senjata atau kekerasan, melainkan dengan memanfaatkan dialog internasional dan media informasi. OPM dibantu organisasi-organisasi internasional, mulai melibatkan diri dalam sidang-sidang maupun konferensi internasional, seperti Forum Negara Pasifik, untuk mencari dukungan dari masyarakat global terhadap perjuangan mereka. Salah satu hal yang dilakukan oleh kelompok pejuang kemerdekaan Papua adalah dengan membentuk Kongres Rakyat Papua yang berfungsi sebagai media bagi kelompok separatis untuk dapat berbicara di PBB dan meminta bantuan Dewan Keamanan

OPM juga berusaha untuk memperluas jaringan mereka dengan membuka kantor perwakilan dan konsulat di beberapa negara (Elisabeth, 2006).

Tidak hanya itu, kelompok separatis Papua juga memanfaatkan perkembangan teknologi dan komunikasi untuk dapat menyebarkan aksi-aksi mereka secara *online* demi mendapatkan dukungan dari masyarakat internasional. Sebagai contoh, aksi separatisme Papua ditunjukkan melalui pembentukan halaman situs *online* maupun website seperti www.melanesianews.org/pdp, www.converge.org.nz/wpapua/, dan www.koteka.net (Wardhani, 2009) yang dimanfaatkan para kelompok separatis untuk kemudian menunjukkan eksistensi mereka. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, khususnya internet tersebut, kelompok separatis berharap mereka dapat memperoleh perhatian dari masyarakat yang kemudian dapat menjadi *lobby* terhadap pemerintah Indonesia untuk mengabdikan kemerdekaan mereka.

Perubahan cara kelompok-kelompok separatis Papua dalam melakukan aksinya tersebut kemudian dilatarbelakangi oleh adanya perubahan dalam dinamika konflik internasional dimana seusai perang dingin, transformasi konflik beralih menjadi konflik sipil yang sarat akan isu-isu kemanusiaan. Momentum tersebut, yang diiringi dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi, kemudian dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang ingin memperjuangkan hak-hak mereka untuk mendapatkan perhatian dan dukungan dari masyarakat internasional. Kondisi inilah yang selanjutnya terjadi dalam kasus separatisme yang ada di Papua. Bagaimana kemudian, aksi separatisme yang pada mulanya kental dengan penggunaan kekerasan dan senjata, kini lebih banyak memanfaatkan pengaruh media dan informasi dalam membangun persepsi publik. Hal ini tentu saja akan memberikan tantangan tersendiri bagi kedaulatan dan keamanan nasional Republik Indonesia sebagai negara kesatuan yang terdiri dari berbagai macam etnis dan suku.

Transformasi Konflik

Konflik dapat didefinisikan sebagai friksi yang disebabkan oleh perbedaan, proximity, dan perpindahan. Konflik merupakan suatu hal yang tak terhindarkan mengingat manusia dan hubungan sosialnya adalah suatu hal yang tidak sama dan tidak statis (Francis, 2002). Berakhirnya Perang Dingin di tahun 1990an, yang ditandai dengan berakhirnya pula kekuatan komunis menyebabkan adanya kekosongan kekuasaan yang memunculkan kesempatan bagi para pemimpin-pemimpin di suatu negara yang tidak stabil untuk menyalahgunakan kekuasaan mereka. Akibatnya, mulai muncul perlawanan-perlawanan yang berlandaskan

identitas, etnisitas, atau agama sebagai bentuk *survival* di 'tatanan dunia baru'. Hilangnya hegemoni dunia, memunculkan perang sipil dan perpecahan.

Dengan adanya perubahan-perubahan ini, kemudian muncullah sebuah teori 'Transformasi konflik' dimana tidak hanya menjabarkan mengenai spesifikasi dari sebuah konflik berdasarkan tempat konflik itu muncul, tetapi juga transformasi budaya dan *exercise of power* (Francis, 2002). Adanya pemahaman mengenai *nonviolence* berkontribusi terhadap teori dari transformasi konflik. Dalam transformasi konflik, ada beberapa isu yang kemudian muncul sebagai karakteristik dalam dinamika konflik. Di era pasca perang dingin, konflik diwarnai dengan perjuangan-perjuangan terhadap hak individu, hak asasi manusia, *civil resistance*, dan *people power*. Konflik era baru ini umumnya didominasi oleh perjuangan oleh masyarakat sipil dengan tanpa kekerasan, untuk melindungi hak-hak dasar individu.

Menurut Diana Francis, pengaruh terbesar dalam teori transformasi konflik adalah '*needs theory*', yaitu dimana tidak terpenuhinya kebutuhan adalah hal yang paling sering menjadi penyebab dari konflik (Francis, 2002). Keinginan untuk dapat memenuhi kebutuhan inilah yang kemudian memunculkan perselisihan yang dapat menimbulkan konflik bersenjata. Meski demikian, umumnya yang banyak terjadi adalah munculnya *nonviolent struggle* sebagai bentuk perlawanan terhadap sebuah ketidakadilan yang terjadi, yang mana hal tersebut menjadi penyebab konflik. Kondisi ini kemudian membentuk sebuah dinamika baru dalam konflik dimana konflik tidak lagi ditandai dari sebuah perlawanan bersenjata, tetapi juga perlawanan tanpa kekerasan. Perubahan karakter dari konflik ini selanjutnya tidak hanya mempengaruhi tipe konflik yang muncul pasca perang dingin, akan tetapi juga merubah metode konflik yang sudah terjadi sebelumnya, salah satunya adalah separatisme.

Separatisme adalah sebuah tindakan yang didasari oleh keinginan untuk merdeka dan *self-determination* yang dilakukan oleh sebuah bangsa atau masyarakat (Fearon, 2004). Menurut James D. Fearon, separatisme adalah sebuah tindakan 'membangkang' dari sebuah bangsa yang menginginkan kebebasan akibat dilanggarnya prinsip-prinsip *self-determination*. Separatisme juga merupakan sebuah konsekuensi dari sistem negara yang memunculkan sentiment akibat adanya diskriminasi terhadap sistem ekonomi dan politik. Dan sebuah bangsa yang menginginkan untuk mendirikan negara baru umumnya memiliki dorongan atau dukungan dari luar dengan adanya pengakuan yang mana menunjukkan mereka diakui sebagai sebuah negara sendiri. Separatisme akan menjadi sebuah masalah selama ada kelompok negara-negara yang memberikan status atau 'kartu' kepada bangsa tersebut untuk menjadi bagian dari *nationhood*.

Pada awalnya, aktivitas-aktivitas separatisme selaku dilakukan dengan jalan kekerasan atau konflik bersenjata. Akan tetapi, semenjak ada pergeseran metode konflik dalam sistem internasional menjadi *nonviolent*, separatisme bersenjata berubah menjadi separatisme tanpa kekerasan. Dan salah satu aksi perlawanan separatisme yang juga mengalami proses transformasi adalah separatisme masyarakat Papua atau *West Papua* di Indonesia.

Separatisme di Papua dan Respon dari Pemerintah Indonesia

Aksi separatisme Papua pada awalnya merupakan bentuk kekecewaan masyarakat Papua terhadap keputusan PBB dalam Perjanjian New York di Tahun 1962 yang menjadikan wilayah Papua sebagai bagian dari kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Djopari 1993). Hasil keputusan yang berbeda dari janji yang diberikan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada saat itu, dimana pada awal kemerdekaan Indonesia, Pemerintah Hindia Belanda menjajikan Papua sebagai negara merdeka, dianggap tidak sesuai dan bukan merupakan keinginan dari masyarakat Papua atau *West Papua* atau *West New Guinea*. Akibatnya, pada tahun 1965 pemberontakan separatisme pecah di Papua yang dipimpin oleh Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Dan pada tanggal 1 Desember 1961, Bendera Papua, atau yang sering disebut dengan *the raising star*, dikibarkan sebagai bentuk kemerdekaan Papua oleh masyarakat Papua. (Webster 2001/2002).

Keinginan Papua untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia juga semakin diperburuk dengan adanya diskriminasi dan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Papua jika dibandingkan masyarakat wilayah Indonesia lainnya, khususnya terkait kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Papua. Kondisi ini semakin meningkatkan aksi separatisme yang dilakukan oleh OPM dan kelompok-kelompok perjuangan di Papua. separatisme tersebut, seperti dengan memberikan otonomi khusus yang juga dikenal dengan Otsus Plus, yang dikeluarkan melalui Undang-Undang tahun 2001 (Widjojo 2014).

Akan tetapi, nampaknya upaya tersebut belum mampu mengatasi permasalahan yang ada. Masih maraknya kepentingan-kepentingan diantara elit politik menjadi penghambat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. Intensitas dan kompleksitas konflik antara aparat militer dengan kelompok separatis juga masih kerap terjadi. Pada tahun 2013, peningkatan intensitas konflik semakin terlihat dimana aparat kepolisian menjadi lebih represif dalam menghadapi kelompok-kelompok separatis seperti *National Liberation Army/Free Papua Movement* (Widjojo 2014). Di tahun tersebut, pihak kepolisian telah menangkap dan melakukan interogasi kepada lebih dari 500 orang. Tidak hanya itu, tahanan politik yang

ditangkap juga meningkat menjadi 75 orang dari jumlah sebelumnya 26 orang ditahun 2012. Selain itu, pemerintah Indonesia juga menghadapi perlawanan dari demonstran-demonstran seperti *National Committee for West Papua* atau KNPB yang tidak hanya menarik dukungan dari masyarakat lokal tetapi juga menjalin jaringan di luar negeri. Oleh karenanya, pihak militer berusaha untuk semakin meningkatkan perlawanan untuk membendung demonstrasi.

Menyadari adanya pertahanan yang semakin ketat dari pasukan militer Indonesia, pada tahun 2013 itu pula pergerakan kelompok separatisme mulai mengalami transformasi. Protes dan perlawanan yang dilakukan tidak lagi dalam bentuk konflik dan kekerasan, melainkan berubah menjadi sebuah protes damai dan kampanye-kampanye melalui forum-forum global. KNPB menggunakan konferensi-konferensi internasional untuk mengkampanyekan ketidakadilan yang diterima masyarakat Papua, dan mempromosikan upaya pembebasan Papua guna memperoleh dukungan internasional. Upaya protes damai ini semakin ditingkatkan setelah mantan pemimpin OPM Benny Wenda membentuk *Free West Papua Campaign* atau FWPC yang sukses menarik perhatian masyarakat internasional di Oxford, Inggris. Hal ini selanjutnya menjadi gaya baru aktivitas separatisme yang dilakukan oleh masyarakat Papua dengan memanfaatkan media dan jaringan *network*.

Media dan Separatisme

Komunikasi dan media massa merupakan elemen yang memainkan peran yang sangat fundamental dalam keberhasilan dan perkembangan sebuah pergerakan sosial. Menurut Manuel Castells, keberhasilan dari sebuah pergerakan sosial sangat ditentukan oleh adanya legitimasi dan dukungan yang disediakan oleh *local group*. Akan tetapi, diperlukan juga bagi kelompok pergerakan sosial untuk dapat berpikir secara lokal dan beraksi secara global atau *think local, act global*. Hal ini dikarenakan, adanya *network* akan memberikan dampak berbeda dari sebuah pergerakan (Van de Donk et al., 2004). Oleh karena menyadari akan pentingnya *network* secara global tersebut, maka dari itu peran teknologi, komunikasi, dan media masa menjadi sangat penting dalam suatu pergerakan.

Dalam hal ini, perkembangan teknologi telah menciptakan sebuah metode komunikasi yaitu internet. Banyak dari pergerakan-pergerakan atau protes yang dilakukan dengan memanfaatkan media atau dapat disebut dengan *cyberprotest*, untuk memaksimalkan hasil dari protes tersebut. *Cyberprotest* ini selanjutnya memberikan dampak terhadap pergerakan untuk dapat diakui dan didengarkan secara global sehingga mampu membantu tercapainya tujuan dari pergerakan tersebut dengan adanya dorongan dan dukungan dari masyarakat global.

Dampak dari perkembangan teknologi dan jaringan komunikasi ini kemudian juga dimanfaatkan oleh kelompok separatis (Wardhani 2009) di Papua untuk dapat membantu mereka meraih perhatian internasional. Persebaran jaringan dunia maya dan akses akan internet yang semakin mudah menjadi jalan bagi separatis di Papua untuk meningkatkan promosi perjuangan mereka di forum-forum internasional. Untuk itu, kelompok dan organisasi-organisasi separatis yang ada di Papua membentuk *website* dan *blog online* untuk membantu menyuarakan aspirasi mereka dalam ranah global. Beberapa *website* yang dibentuk oleh kelompok separatis (Wardhani 2009) diantaranya www.converge.org.nz/wpapua/ yang menyediakan informasi-informasi terkait sejarah OPM, berbagai permasalahan di Papua, dan juga upaya kemerdekaan Papua yang dilakukan oleh OPM. Situs online kedua adalah www.melanesia.org/pdp yang merupakan situs resmi Presidium Dewan Papua atau PDP, yang mana situs tersebut berikan informasi mengenai perjuangan PDP dalam upaya kemerdekaan Papua (Wardhani 2009).

Situs ketiga adalah www.koteka.net yang berisikan tentang segala fenomena, peristiwa, dan tindak pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah Indonesia kepada masyarakat Papua sebagai bukti dari alasan perjuangan kemerdekaan Papua. Disamping ketiga website tersebut, juga terdapat beberapa halaman online lainnya seperti www.westpapuaaction.buz.org, www.freewestpapua.org, dan www.westpapua.net yang mana hampir seluruhnya merupakan situs-situs online yang berisi gambar-gambar dan kampanye kemerdekaan masyarakat Papua.

Berkat dibentuknya media-media online untuk membantu protes dan kampanye yang dilakukan oleh kelompok separatis, tak sedikit dari organisasi maupun forum internasional, khususnya yang berkecimpung dalam permasalahan HAM, yang akhirnya memberikan dukungan untuk kemerdekaan Papua. Dukungan masyarakat internasional ini tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi kedaulatan dan keamanan nasional Negara Republik Indonesia.

Tantangan Keamanan Nasional Indonesia

National Security atau Keamanan nasional dapat didefinisikan sebagai kemampuan negara untuk menjaga nilai-nilai internal mereka dari ancaman dari luar. Sedangkan menurut Cohen dan Tuttle dalam Hermann (1977), keamanan juga dapat diartikan sebagai kondisi protektif dimana pemerintah atau aparaturnya berusaha untuk menjaga pemerintahannya dari ancaman baik ancaman internal maupun eksternal (Hermann, 1977). Keamanan nasional

bukanlah sesuatu hal yang statis. Akan tetapi dapat berubah-ubah berdasarkan perubahan konteks yang menjadi penyebab ancaman.

Dalam hal ini, isu-isu mengenai upaya kemerdekaan Papua, dapat memunculkan ancaman terhadap kedaulatan Indonesia. Upaya OPM dan kelompok separatis untuk menyebarkan kampanye kemerdekaan Papua melalui media sosial dan jaringan *network* memunculkan beberapa dukungan internasional agar Indonesia segera melepaskan Papua. Beberapa dukungan ditunjukkan organisasi-organisasi internasional seperti *International Parliamentarians for West Papua (IPWP)* yang terbentuk di Inggris, *West Papua Action* di Irlandia, dan *West Papua Action Network* atau Westpan di Kanada. Tidak hanya itu. Beberapa negara seperti Vanuatu, Nauru, dan *Cook Island* juga memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Papua (LIPI 2012).

Perjuangan kelompok separatis melalui jaringan *network* dan media online ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Indonesia, dikarenakan ancaman yang diberikan bukanlah ancaman militer sebagaimana konflik bersenjata, akan tetapi dapat mengganggu stabilitas dan kedaulatan negara. Dalam menghadapi ancaman berupa *non-violent struggle* seperti ini, pemerintah tidak dapat hanya dengan mengandalkan kekuatan militer yang dimiliki, tetapi juga membutuhkan strategi melalui *soft power* dan diplomasi kepada masyarakat internasional yang mana nampaknya hal ini belum dimaksimalkan oleh pemerintah Indonesia. Oleh karenanya, pergerakan separatisme gaya baru melalui pemanfaatan media online dan *networking* ini kini memunculkan tantangan bagi keamanan nasional Indonesia.

Kesimpulan

Perubahan dinamika konflik internasional mempengaruhi karakter dari konflik menjadi tidak lagi hanya berupa konflik kekerasan, tetapi juga konflik *non-violent* atau non-violent. Kondisi ini juga turut merubah pergerakan separatisme yang terjadi di Papua. Separatisme yang dulu sangat identik dengan konflik bersenjata yang muncul akibat persetujuan antara kelompok separatis dan aparat keamanan Republik Indonesia, kini berubah menjadi pergerakan damai melalui pemanfaatan media online sebagai media kampanye kelompok tersebut. Hal ini menjadi tantangan nasional tersendiri bagi Indonesia untuk dapat mempertahankan kedaulatan negaranya ditengah meningkatnya dukungan publik untuk kemerdekaan Papua. Oleh karena, strategi dan diplomasi yang tepat perlu dilakukan guna menghadapi bentuk *cyberprotest* yang dilakukan para kelompok separatis Papua.

Referensi

- Ackerman, Peter, and Rodal Berel. "The Strategic Dimension of Civil Resistance." *Survival* 50, no. no.3 (2008): 111-126.
- Chauvel, Richard, and Ikrar Nusa Bhakti. *The Papua Conflict: Jakarta's Perceptions and Policies*. Washington: East-West Center Washington, 2004.
- Djopari, John RG. *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka* . Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1993.
- Elisabeth, Adriana. "Dimensi Internasional Kasus Papua." *Jurnal Penelitian Politik "Papua Menggugat"* 3, no. 1 (2006): 43-63.
- Fearon, James D. "Separatist Wars, Partition, and World Order." Conference Paper, Standford University, Standford, 2004.
- Francis, Diana. *People, Peace and Power "Conflict Transformation in Action"*. London: Pluto Press, 2002.
- Hermann, Charles F. "Defining National Security." 1977.
- LIPI. *Jurnal Penelitian Politik* , 2012.
- MacLeod, Jason. "Nonviolent Struggle in West Papua: " We Have a Hope"." In *Nonviolent Alternatives for Social Changes*. Oxford: EOLSS Publications, 2009.
- Sugandi, Yulia. "Analisis Konflik dan Rekomendasi Kebijakan Mengenai Papua." FES, Jakarta, 2008.
- Tebay, Neles. *West Papua "The struggle for peace with justice*. Catholic Institute for International Relations, London: British Library, 2005.
- Van de Donk, Wim, Brian D Loader, Paul G Nixon, and Dieter Rucht. *Cyberprotest "New Media, Citizens and Social Movements"*. London and New York: Routledge, 2004.
- Wardhani, Baiq. "Papua on the Net: Perjuangan Pemisahan Diri Papua Melalui Dunia Maya." Paper Draft, Universitas Airlangga, 2009.
- Webster, David. "Already Sovereign as a People: A Foundational Moment in West Papuan Nationalism." *Pasific Affairs Vol.74:4*, 2001/2002: 507-528.
- Widjojo, Muridan S. "Political Review Melanesia: Papua." *The Contemporary Pasific Vol 26:2*, 2014: 507-515.